

PEMILU DALAM BAYANG-BAYANG FEODALISME POLITIK TERHADAP TANTANGAN INTEGRITAS DI DAERAH OTONOMI

Muhammad Mas Davit Herman Rudiysah

Email: muhammadmasdavith98@gmail.com

ABSTRAK

Pemilu di daerah otonomi di Indonesia tidak hanya menjadi arena kompetisi politik, tetapi juga ruang yang sarat dengan praktik feodalisme politik, terutama melalui politik dinasti dan loyalitas personal. Studi ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan sosio-legal untuk menelaah bagaimana regulasi pemilu, kultur politik lokal, serta dinamika patronase berpengaruh terhadap integritas demokrasi elektoral. Hasil studi menunjukkan bahwa politik dinasti berkembang subur karena lemahnya regulasi dan pengawasan, serta diperkuat oleh sikap pragmatis partai politik yang lebih mengutamakan elektabilitas daripada kaderisasi. Sementara itu, loyalitas personal masyarakat terhadap figur pemimpin, yang berakar pada kultur paternalistik dan jejaring patron-klien, menciptakan distorsi serius terhadap prinsip kebebasan memilih. Kondisi ini mengurangi transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pemilu, sekaligus mempersempit ruang partisipasi politik warga negara. Oleh karena itu, pemberian integritas pemilu melalui reformasi regulasi, penguatan partai politik, dan pendidikan politik masyarakat menjadi agenda mendesak untuk memastikan demokrasi lokal berjalan lebih inklusif, akuntabel, dan berorientasi pada kedaulatan rakyat.

Kata kunci: Feodalisme Politik, Integritas Pemilu, Daerah Otonomi

ELECTIONS IN THE SHADOW OF POLITICAL FE DALISM TOWARDS THE CHALLENGES OF INTEGRITY IN AUTONOMOUS REGIONS

ABSTRACT

Elections in Indonesia's autonomous regions are not only an arena for political competition but also a space rife with feudal practices, particularly through dynastic politics and personal loyalties. This paper examines how election regulations work using a normative juridical technique and a socio-legal perspective, local political culture, and patronage dynamics influence the integrity of electoral democracy. The results show that dynastic politics thrive due to weak regulations and oversight, and are reinforced by the pragmatic attitudes of political parties that prioritize electability over cadre development. Meanwhile, the community's personal loyalty to leadership figures, rooted in a paternalistic culture and patron-client networks, creates serious distortions of the principle of freedom of choice. This condition reduces transparency, accountability, and fairness in elections, while simultaneously narrowing the space for citizen political participation. Therefore, improving election integrity through regulatory reform, strengthening political parties, and public political education is an urgent agenda to ensure that local democracy is more inclusive, accountable, and oriented towards popular sovereignty.

Keyword: Political Feudalism, Election Integrity, Autonomous Regions

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu instrumen utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi, baik di tingkat nasional maupun lokal. Sebagai mekanisme politik, pemilu tidak hanya dipahami sebagai prosedur elektoral untuk menentukan siapa yang berhak memegang kekuasaan, melainkan juga sebagai cerminan integ-

ritas sistem politik yang berlaku. Pemilu di daerah otonomi menghadirkan dinamika yang lebih kompleks dibandingkan level nasional. Pemilihan umum kerap disebut sebagai pesta demokrasi karena menjadi sarana pembentukan sistem kekuasaan negara yang berlandaskan kedaulatan rakyat serta prinsip permusyawaratan

93 M. P. A Abas, Birokrasi Dan Dinamika Politik Lokal. Lontar Mediatama, 2018.

perwakilan sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Mekanisme ini lahir dari aspirasi rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak mereka, dan menjadi instrumen sah untuk menentukan arah kepemimpinan. Melalui pemilu, pergantian pemimpin dapat berlangsung secara konstitusional, meskipun di dalamnya tidak jarang muncul persaingan yang ketat di antara para kandidat yang berambisi menempati posisi politik maupun jabatan struktural dalam pemerintahan. Di satu sisi, masyarakat memiliki lebih banyak ruang untuk berpartisipasi secara politik dalam memilih pemimpin daerah berkat otonomi daerah. Di sisi lain, terdapat masalah signifikan yang membahayakan integritas pemilu, terutama ketika demokrasi elektoral berhadapan dengan bayang-bayang feodalisme politik yang berwujud pada praktik politik dinasti maupun loyalitas personal.

Peristiwa feodalisme politik di daerah otonomi tidak dapat dilepaskan dari warisan budaya sosial masyarakat Indonesia yang masih kental dengan pola patron-klien. Dalam tradisi ini, hubungan politik sering kali tidak didasarkan pada kapasitas, integritas, atau visi kandidat, melainkan lebih pada kedekatan personal, garis keturunan, serta relasi

patronase yang terbangun secara turun-temurun. Politik dinasti lahir sebagai konsekuensi dari jejak feodalisme yang masih menunjukkan keberlanjutan yang signifikan dalam struktur kehidupan masyarakat. Bentuk feodalisme tersebut tidak hanya terkait dengan dominasi atas aspek ekonomi, melainkan juga mencakup konstruksi jaringan loyalitas sosial yang berpusat pada tokoh-tokoh informal. Figur-firgur informal ini umumnya memiliki basis massa yang besar dan loyal, yang kemudian dimanfaatkan untuk memperkuat serta mempertahankan dominasi politik keluarga tertentu.

Konsekuensinya, politik dinasti menjadi peristiwa yang mudah berkembang di tingkat lokal, di mana jabatan politik diwariskan dari satu keluarga kepada generasi berikutnya. Praktik semacam ini jelas menghadirkan dilema besar dalam demokrasi, sebab secara substantif ia mereduksi esensi kompetisi yang seharusnya terbuka, adil, dan berbasis meritokrasi.

Dalam konteks pemilu daerah, feodalisme politik tidak

94 A Dedi, "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2022): 92–101, <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596>.

95 Ruruh Aris Setyawibawa, *Rivalitas Politik Dinasti*. Umsu Press, 2025.

96 W. R Djati, "Revivalisme Kekuatan Familiisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik Di Aras Lokal," *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 18, no. 2 (2014): 72–100, <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.7454/MJS.v18i2.1234>.

jarang beroperasi melalui loyalitas personal yang mengikat masyarakat pemilih pada figur tertentu, bukan pada gagasan atau program politik. Situasi ini menciptakan bias dalam proses pemilihan, di mana pemilih lebih banyak digerakkan oleh ikatan emosional atau kewajiban sosial daripada pertimbangan rasional. Loyalitas semacam ini semakin diperkuat oleh relasi ekonomi dan sosial, seperti pemberian bantuan langsung, janji pekerjaan, atau akses terhadap sumber daya publik. Akibatnya, integritas pemilu diperlakukan karena ruang kompetisi menjadi timpang dan tidak lagi mencerminkan kehendak bebas warga negara.

Tantangan lain yang muncul adalah bagaimana feodalisme politik berkelindan dengan struktur kekuasaan lokal yang sering kali lemah dalam pengawasan. Otonomi daerah memang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya, tetapi keleluasaan tersebut tidak selalu diikuti dengan sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam banyak kasus, dinasti politik justru memanfaatkan kelemahan regulasi untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan mempertahankannya dalam jangka panjang. Peris-

tiwa ini tidak hanya menciptakan kesenjangan politik, tetapi juga berpotensi mengurangi kualitas pelayanan publik karena orientasi utama penguasa lokal lebih tertuju pada pelestarian kekuasaan keluarga atau kelompok.

Dari sudut pandang integritas pemilu, feodalisme politik di daerah otonomi dapat dipandang sebagai ancaman laten. Integritas pemilu sejatinya mengacu pada prinsip keadilan, keterbukaan, transparansi, dan partisipasi yang sehat dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilu. Namun, ketika proses pemilu dikuasai oleh figur atau keluarga tertentu, ruang kompetisi menjadi terbatas, bahkan terdistorsi. Kandidat lain yang tidak memiliki basis keluarga politik atau jaringan patron-klien yang kuat sering kali kesulitan mendapatkan akses sumber daya politik, seperti dukungan partai, modal kampanye, maupun perhatian media. Dengan demikian, pemilu di daerah otonomi berisiko hanya menjadi formalitas demokrasi tanpa substansi, karena hasilnya sudah dapat diprediksi berdasarkan kekuatan dinasti atau loyalitas feodal yang mengakar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa politik dinasti sering mem-

97 Aermadepa Aermadepa et al., *Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia: Tantangan Dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

peroleh legitimasi dengan alasan stabilitas dan kesinambungan pembangunan. Narasi ini kerap dijadikan pembernan bahwa kepemimpinan berbasis keluarga lebih mampu menjaga kesinambungan program dan mengurangi konflik politik. Namun, pandangan tersebut problematis karena menutup peluang bagi lahirnya pemimpin alternatif yang mungkin lebih kompeten dan inovatif. Bahkan, dalam jangka panjang, praktik ini dapat menimbulkan monopoli kekuasaan yang berbahaya, melemahkan demokrasi lokal, dan memperkuat budaya politik yang transaksional.

Di sisi lain, loyalitas personal dalam politik lokal juga tidak dapat dilepaskan dari aspek kultural masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai hormat terhadap figur pemimpin. Dalam masyarakat dengan tradisi paternalistik, pemimpin dipandang sebagai simbol kekuasaan yang layak dihormati, bahkan tanpa harus dipertanyakan kapasitas dan integritasnya. Situasi ini memperlihatkan bahwa tantangan demokrasi lokal di Indonesia

bukan hanya persoalan regulasi atau teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga persoalan kultur politik yang masih berorientasi pada personalitas dan patronase.

Peristiwa ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan praktik penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral. semakin marak pada era reformasi, ketika hampir di seluruh daerah, baik di kawasan kepulauan maupun daratan, mulai tumbuh pola kekuasaan yang bertumpu pada hubungan keluarga dan kekerabatan. Tidak jarang, dinasti politik memanfaatkan jabatan publik untuk memperkuat loyalitas massa, misalnya melalui program populis atau distribusi bantuan sosial yang disalurkan secara selektif. Praktik ini jelas mencederai prinsip integritas pemilu, sebab kompetisi yang seharusnya berlangsung adil justru dikotori oleh manipulasi kekuasaan. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka demokrasi di daerah otonomi hanya akan menjadi arena konsolidasi kekuasaan elit lokal, sementara rakyat hanya menjadi obyek pasif dalam siklus electoral. Hal tersebut menunjukkan urgensi untuk menelaah secara mendalam keberlangsungan feodalisme politik, baik yang terwujud melalui politik dinasti maupun melalui ikatan loyalitas personal,

98 F Dason, "Independensi Komisi Pemilihan Umum Dalam Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemerintah Pada Pelaksanaan Tahapan Pemilu (Doctoral Dissertation, IAIN Pare Pare)," 2023.

99 F Arifin, "Politik Dinasti Dan Pembaruan Sistem Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 31, no. 3 (2024): 636–65, [https://doi.org/https://doi.org/10.20885/ijustum.vol31.iss3.art7](https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.20885/ijustum.vol31.iss3.art7).

100 I Nurdin, E Suaini, and I. R Banne, "Filipinazion of Indonesian Politics: Politics of Family Formation in Southeast Sulawesi," *Scientific Journal of PPI-UKM* 3, no. 7 (2017): 333–40, <https://mail.kemalapublisher.com/index.php/ppi-ukm/article/view/248>.

memengaruhi integritas pemilu di daerah otonomi. Studi ini tidak hanya relevan untuk memahami dinamika demokrasi lokal di Indonesia, tetapi juga memberikan gambaran lebih luas mengenai tantangan yang dihadapi demokrasi substantif di negara berkembang. Dengan memahami akar persoalan ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif untuk memperkuat integritas pemilu, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu, serta menumbuhkan kultur politik yang lebih demokratis dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pada akhirnya, pemilu dalam bayang-bayang feodalisme politik menjadi refleksi penting bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi ujian serius. Demokrasi elektoral tanpa integritas hanya akan melahirkan pemerintahan yang rapuh, tidak responsif, dan cenderung mengulang pola feodalisme dalam bentuk baru. Tantangan ini menuntut perhatian serius, baik dari lembaga negara, partai politik, masyarakat sipil, maupun warga negara, agar pemilu benar-benar menjadi sarana kedaulatan rakyat, bukan sekadar panggung legitimasi bagi segelintir elit lokal yang mempertahankan kekuasaan melalui dinasti dan loyalitas feodal.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan sosio-politik, yang berupaya memahami peristiwa feodalisme politik dan tantangannya terhadap integritas pemilu dalam kerangka hukum dan praktik demokrasi lokal. Pendekatan yuridis normatif dipilih untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menerangkan perihal Pemilu, serta peraturan terkait otonomi daerah. Analisis terhadap norma hukum ini penting untuk melihat sejauh mana instrumen hukum mampu mengantisipasi praktik politik dinasti maupun pengaruh loyalitas personal dalam pemilu.

Selain itu, studi ini juga menerapkan pendekatan sosio-legal melalui kajian literatur, dokumen, dan data empiris sekunder yang diperoleh dari laporan lembaga pemilu, kajian akademik, serta pemberitaan media. Pendekatan ini dipilih karena persoalan

101 S Khoirinnisa, "Urgensi Reformasi Sistem Pemilu Serentak Dalam Menjamin Efektivitas Pemerintahan Di Indonesia," *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2024): 93–103, <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.169>.

102 Fazlaz Rusyda Kamila, "Praktik Money Politic Pemilu Tahun 2019 Di Kota Semarang Dan Penegakan Hukumnya Oleh Sentra Gakkumdu Berdasarkan UU Nomor 7 Tentang Pemilu, Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang," 2022, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19412/>.

feodalisme politik tidak hanya dapat dipahami dari sudut normatif, tetapi juga harus dilihat dari praktik sosial dan budaya politik masyarakat lokal. Dengan demikian, studi ini memadukan analisis hukum dengan dinamika sosial yang berkembang di daerah otonomi.

Data dikumpulkan melalui pendekatan studi pustaka dengan melakukan telaah terhadap literatur yang relevan, meliputi buku, jurnal, dan laporan studi, serta data statistik dari lembaga resmi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menerapkan metode kualitatif deskriptif, yaitu memaparkan fakta, menafsirkan hubungan antar-variabel, serta menarik kesimpulan mengenai pengaruh feodalisme politik terhadap integritas pemilu. Dengan metode ini, studi diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai interaksi antara norma hukum, praktik politik dinasti, serta loyalitas personal dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia.

HASIL ANALISIS

Hasil studi menunjukkan bahwa pemilu di daerah otonomi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dominasi feodalisme

103 N Hafizah et al., "Identifikasi Variabel Studi, Jenis Sumber Data Dalam Studi Pendidikan," QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora 3, no. 2 (2025): 586–96, <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1025>.

politik yang berwujud pada politik dinasti dan loyalitas personal. Oligarki tidak hanya tampil sebagai struktur kekuasaan formal, tetapi juga mewujud dalam praktik relasi sosial-politik yang berlandaskan pada penguasaan sumber daya ekonomi dan jejaring patronase.

Dalam lahirnya dinasti politik merupakan bentuk konkret dari praktik oligarki, di mana kekuasaan diwariskan atau diperlakukan melalui hubungan keluarga dan kekerabatan. Pola tersebut memperkuat dominasi elit dengan membatasi akses politik masyarakat luas, sehingga kekuasaan tetap terkonsentrasi pada lingkaran yang sama dari generasi ke generasi. Dalam banyak kasus, dinamika politik lokal masih terjebak dalam pola patronase tradisional yang menempatkan keluarga penguasa sebagai pusat kekuasaan. Politik dinasti, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai pewarisan jabatan politik yang berlangsung antaranggota keluarga, dari satu pihak kepada pihak lainnya, menjadi salah satu bentuk nyata dari feodalisme politik di era demokrasi elektoral. Hal ini memperlihatkan bahwa demokrasi yang diharapkan mampu membuka ruang partisi-

104 J. A Winters, *Oligarchy*. Cambridge University Press., 2011.

105 W. R Effendi, "Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten," *Jurnal Trias Politika* 2, no. 2 (2018): 233–47, [https://doi.org/https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471](https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471).

pasi luas bagi warga negara justru beroperasi dalam lingkaran kekuasaan terbatas.

Analisis terhadap sejumlah daerah otonomi memperlihatkan bahwa politik dinasti tumbuh subur karena adanya kelemahan regulasi dan pengawasan pemilu. Regulasi hukum memang tidak secara tegas melarang anggota keluarga petahana mencalonkan diri, sehingga peluang untuk melanjutkan kekuasaan tetap terbuka. Kondisi ini dimanfaatkan oleh elit lokal untuk mempertahankan pengaruhnya melalui pencalonan pasangan, anak, atau kerabat dekat. Dari perspektif integritas pemilu, praktik semacam ini menimbulkan distorsi serius. Kompetisi politik yang seharusnya berlangsung secara adil berubah menjadi arena dengan kecenderungan dominasi keluarga tertentu, sehingga mereduksi prinsip kesetaraan kesempatan bagi semua kandidat.

Selain faktor regulasi, politik dinasti juga didorong oleh loyalitas personal masyarakat terhadap figur pemimpin. Hasil analisis memperlihatkan bahwa di daerah-daerah dengan kultur paternalistik yang kuat, masyarakat cenderung memberikan dukungan berdasarkan hubungan emosional dan kekerabatan, bukan berdasar-

kan evaluasi rasional terhadap visi atau program kandidat. Loyalitas personal ini diperkuat oleh praktik pemberian patronase, seperti bantuan sosial, pekerjaan, atau fasilitas ekonomi yang terikat dengan posisi politik keluarga penguasa. Dalam situasi ini, pemilih tidak berada pada posisi independen, melainkan lebih sebagai bagian dari jaringan loyalitas yang sulit diputus.

Peristiwa tersebut menciptakan tantangan serius bagi integritas pemilu di daerah otonomi. Integritas pemilu sejatinya mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta kebebasan memilih. Namun hasil studi menunjukkan bahwa keempat prinsip ini sering kali terganggu dalam praktik pemilu lokal. Transparansi berkurang ketika proses pencalonan lebih ditentukan oleh pertimbangan keluarga daripada mekanisme partai yang demokratis. Akuntabilitas

106 B. P Suhendarto, "Masa Depan Pengaturan Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," *Jurnal Gagasan Hukum* 6, no. 1 (2024): 62–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19883>.

107 T. S Sihombing, D Manatu, and A. L Towing, "Dinamika Preferensi Pemilih Milenial Pada Pemilihan Kepala Desa Dolok Margu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 4828–43, <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9945>.

108 P. R Situmorang and H Yusuf, "Struktur Sosial Dan Budaya Korupsi: Analisis Kriminologis Terhadap Praktik Korupsi Di Lembaga Pemerintahan," *Jurnal Intelek Insan Cendekia* 2, no. 8 (2025): 14057–66, <https://jicnusantara.com/index.php/jic/article/view/4507>.

109 H Prasojo et al., "Evaluasi Demokrasi Internal Partai Politik Di Indonesia: Optimalisasi Transparansi Dan Partisipasi Untuk Mencegah Oligarki," In *Prosiding Seminar Nasional LPPM UNSOED* 14 (2025): 913–27, <https://www.researchgate.net/profile/Hermawan>.

melemah ketika pejabat publik menerapkan sumber daya negara untuk memperkuat basis dukungan dinasti. Prinsip keadilan juga tercederai karena kandidat independen atau non-dinasti kesulitan bersaing tanpa akses terhadap sumber daya politik dan ekonomi yang sama.

Analisis terhadap kasus-kasus konkret memperlihatkan adanya pola konsolidasi kekuasaan yang sistematis. Misalnya, dalam beberapa daerah, jabatan bupati yang berakhir kemudian dilanjutkan oleh istri, anak, atau kerabat dekat. Proses ini tidak hanya berlangsung di tingkat eksekutif, tetapi juga merambah ke lembaga legislatif daerah. Dengan cara ini, sebuah keluarga dapat menguasai ekosistem politik lokal dalam jangka panjang. Hal ini bukan hanya mempersempit ruang demokrasi, melainkan turut menghasilkan oligarki lokal yang kontradiktif terhadap prinsip demokrasi konstitusional.

Hasil studi juga menunjukkan bahwa politik dinasti sering dikaitkan dengan argumentasi stabilitas dan kesinambungan pembangunan. Namun ketika dianalisis lebih dalam, alasan ini cenderung menjadi legitimasi semu. Faktanya, kesinambungan pembangu-

nan tidak selalu terjamin di bawah dinasti politik. Sebaliknya, yang sering muncul adalah konsolidasi kepentingan keluarga untuk mengamankan akses ekonomi dan politik. Situasi ini memperlihatkan bahwa feodalisme politik dalam pemilu lokal lebih berorientasi pada pelestarian kekuasaan daripada pemenuhan kepentingan masyarakat luas.

Selain politik dinasti, loyalitas personal juga memberikan kontribusi besar terhadap rapuhnya integritas pemilu. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam banyak daerah, pemilih masih berada dalam tekanan sosial untuk mendukung kandidat tertentu. Loyalitas personal yang dibangun melalui hubungan patron-klien sering kali diperkuat dengan praktik politik uang. Dalam konteks ini, demokrasi lokal berjalan dalam ruang semu, secara prosedural ada pemilu, tetapi secara substantif kebebasan memilih terdistorsi oleh tekanan sosial, ekonomi, maupun budaya.

Pengaruh loyalitas personal terhadap pemilu juga dapat dilihat dari kecenderungan masyarakat untuk mempertahankan hubungan dengan figur pemimp-

110 S. M Harahap, "Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Dengan Loyalitas Sebagai Variabel Intervening: Studi Pada Bawaslu Se-Tapanuli Bagian Selatan (Doctoral Dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan)," 2024, <https://etd.uinsyiahada.ac.id/12036/>.

in meskipun terdapat indikasi pelanggaran etika atau hukum. Dalam sejumlah kasus, keterlibatan keluarga penguasa dalam praktik korupsi tidak serta-merta mengurangi dukungan elektoral mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan personal lebih dominan daripada rasionalitas politik. Situasi tersebut semakin memperkuat feodalisme politik yang berbahaya bagi integritas pemilu karena mengabaikan prinsip akuntabilitas publik.

Hasil analisis juga mengungkapkan adanya peran partai politik yang cenderung pragmatis dalam memperkuat politik dinasti. Alih-alih menjadi penjaga demokrasi, partai sering kali lebih memilih mendukung kandidat dari keluarga penguasa karena dianggap memiliki elektabilitas dan sumber daya yang kuat. Sikap pragmatis ini memperlemah fungsi kaderisasi partai, sekaligus mempersempit ruang bagi calon alternatif yang berpotensi menghadirkan perubahan. Dengan demikian, partai just-ru ikut melanggengkan feodalisme politik di daerah otonomi.

Studi ini juga menemukan

111 Z Ansori and A. M Si, "Rasionalitas Partai Politik Dalam Penentuan Calon Anggota Legislatif Lombok Tengah Tahun 2019," Politea: Jurnal Politik Islam 2, no. 2 (2019): 49–66, <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1364>.

112 A. J. K Remanu et al., "Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Demokrasi Lokal: Pengaruh Politik Keluarga Atut Di Provinsi Banten," Journal Of Goverment (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah) 10, no. 2 (2025): 1–18, <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/view/8427>.

bahwa praktik feodalisme politik berimplikasi pada menurunnya kualitas pemerintahan daerah. Orientasi kekuasaan yang berpusat pada keluarga penguasa cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok terbatas. Dalam jangka panjang, hal ini memperbesar potensi konflik kepentingan, meningkatkan ketidakpuasan masyarakat, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Dengan kata lain, feodalisme politik tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Meski demikian, terdapat pula upaya dari masyarakat sipil dan lembaga pengawas pemilu untuk mendorong perbaikan integritas pemilu di daerah otonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengawasan publik melalui media, organisasi masyarakat, maupun lembaga independen mampu menekan praktik manipulasi kekuasaan. Namun, efektivitas pengawasan ini masih terbatas karena tidak jarang berhadapan dengan dominasi politik lokal yang kuat. Hal ini menegaskan bahwa perlawan terhadap feodalisme politik

113 M Maiwan, "Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan Dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik," Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi 15, no. 2 (2016): 75–91, <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.21009/jimd.v15i2.8815>.

membutuhkan dukungan sistemik, baik melalui regulasi yang lebih ketat, penegakan hukum yang konsisten, maupun pendidikan politik yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil studi memperlihatkan bahwa pemilu di daerah otonomi masih berada dalam bayang-bayang feodalisme politik. Politik dinasti dan loyalitas personal menjadi dua faktor utama yang menggerus integritas pemilu dan mengurangi substansi demokrasi lokal. Hal ini menunjukkan adanya kontradiksi antara idealisme demokrasi yang menekankan kedaulatan rakyat dengan praktik politik lokal yang masih didominasi elit keluarga dan relasi patron-klien. Untuk itu, diperlukan langkah strategis guna memperkuat integritas pemilu, termasuk reformasi regulasi, peningkatan peran partai politik, serta pembangunan kesadaran kritis masyarakat. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa tantangan terbesar bagi demokrasi lokal di Indonesia bukan sekadar teknis penyelenggaraan pemilu, melainkan struktur sosial-politik yang masih sarat dengan feodalisme. Selama politik dinasti dan loyalitas personal tetap mendominasi,

maka pemilu akan sulit menjadi sarana sejati kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pemberian integritas pemilu harus dipandang sebagai agenda mendesak untuk memastikan bahwa demokrasi di daerah otonomi benar-benar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa praktik pemilu di daerah otonomi di Indonesia masih kuat dipengaruhi oleh pola feodalisme politik yang berwujud dalam politik dinasti dan loyalitas personal. Dinasti politik yang diwariskan melalui hubungan keluarga dan kekerabatan telah menciptakan ruang politik yang sempit, membatasi partisipasi warga negara, serta mengkonsentrasi kekuasaan pada kelompok elit tertentu. Loyalitas personal yang tumbuh dari kultur paternalistik dan diperkuat oleh jejaring patronase semakin memperlemah independensi pemilih, sehingga pemilu kehilangan makna substantif sebagai sarana kedaulatan rakyat. Lemahnya regulasi dan sikap pragmatis partai politik turut melanggengkan dominasi elit, sekaligus mengabaikan prinsip integritas, transparansi, dan keadilan dalam kompetisi politik. Dampak-

114 H Ananda et al., "Pengaruh Oligarki Dan Politik Uang Pada Hambatan Struktural Demokrasi Di Lampung," *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik* 2, no. 4 (2025): 1154-60, <https://doi.org/http://jurnal.ittc.web.id/index.php/jiksp/article/view/2683>.

nya tidak hanya pada berkurangnya kualitas demokrasi lokal, tetapi juga pada menurunnya tata kelola pemerintahan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, pembenahan sistemik menjadi agenda mendesak melalui reformasi regulasi, penguanan fungsi partai politik, peningkatan pengawasan publik, serta pendidikan politik yang berkelanjutan. Hanya dengan langkah-langkah strategis tersebut, demokrasi di daerah otonomi dapat berkembang secara lebih inklusif, akuntabel, dan benar-benar mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Abas, M. P. A. Birokrasi Dan Dinamika Politik Lokal. Lontar Mediatama, 2018.

Aermadepa, Aermadepa, Jayanti Puspitaningrum, Putu Bagus Dananjaya, Dian Ferricha, Wendra Yunaldi, Putu Lantika Oka Permadhi, Taufik Firmanto, et al. Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia: Tantangan Dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Ananda, H, A. S Azahra, S Sari, D. R Palestan, A Halim, R Hidayatulloh, and L. P Priam-

bodo. "Pengaruh Oligarki Dan Politik Uang Pada Hambatan Struktural Demokrasi Di Lampung." *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik* 2, no. 4 (2025): 1154–60. <https://doi.org/http://jurnal.ittc.web.id/index.php/jik-sp/article/view/2683>.

Ansori, Z, and A. M Si. "Rasionalitas Partai Politik Dalam Penentuan Calon Anggota Legislatif Lombok Tengah Tahun 2019." *Politea: Jurnal Politik Islam* 2, no. 2 (2019): 49–66. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1364>.

Arifin, F. "Politik Dinasti Dan Pembaruan Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 31, no. 3 (2024): 636–65. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art7>.

Dason, F. "Independensi Komisi Pemilihan Umum Dalam Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemerintah Pada Pelaksanaan Tahapan Pemilu (Doctoral Dissertation, IAIN Pare Pare).," 2023.

Dedi, A. "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu*

Pemerintahan 8, no. 1 (2022): 92–101. [https://doi.org/https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596](https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2596).

Djati, W. R. “Revivalisme Kekuatan Familisme Dalam Demokrasi: Dinasti Politik Di Aras Lokal.” Masyarakat: Jurnal Sosiologi 18, no. 2 (2014): 72–100. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.7454/MJS.v18i2.1234>.

Effendi, W. R. “Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten.” Jurnal Trias Politika 2, no. 2 (2018): 233–47. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471>.

Hafizah, N, M Sari, R Winanda, R Hidayatullah, and H Harmonedi. “Identifikasi Variabel Studi, Jenis Sumber Data Dalam Studi Pendidikan.” QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora 3, no. 2 (2025): 586–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/jq.v3i2.1025>.

Harahap, S. M. “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Dengan Loyalitas Sebagai Variabel Intervening: Studi Pada Bawaslu Se-Tapanuli Bagian

Selatan (Doctoral Dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan),” 2024. <https://etd.uinsyahada.ac.id/12036/>.

Kamila, Fazlar Rusyda. “Praktik Money Politic Pemilu Tahun 2019 Di Kota Semarang Dan Penegakan Hukumnya Oleh Sentra Gakkumdu Berdasarkan UU Nomor 7 Tentang Pemilu. Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,” 2022. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19412/>.

Khoirinnisa, S. “Urgensi Reformasi Sistem Pemilu Serentak Dalam Menjamin Efektivitas Pemerintahan Di Indonesia.” Jurnal Legalitas 2, no. 2 (2024): 93–103. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.169>.

Maiwan, M. “Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan Dan Kedudukannya Dalam Sistem Politik.” Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi 15, no. 2 (2016): 75–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/jimd.v15i2.8815>.

Nurdin, I, E Suaib, and I. R Banne. “Filipinazion of Indonesian Politics: Politics of Family Formation in Southeast Sulawesi.”

Scientific Journal of PPI-UKM 3, no. 7 (2017): 333–40. <https://mail.kemalapublisher.com/index.php/ppi-ukm/article/view/248>.

Prasojo, H, E. D Cahyani, S. D Amalia, and H Gunawan. “Evaluasi Demokrasi Internal Partai Politik Di Indonesia: Optimalisasi Transparansi Dan Partisipasi Untuk Mencegah Oligarki.”

In Prosiding Seminar Nasional LPPM UNSOED 14 (2025): 913–27. <https://www.researchgate.net/profile/Hermawan>.

Remanu, A. J. K, N. A Ramadhani, T. R Dewi, A. J Azzahra, and R Ridwan. “Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Demokrasi Lokal: Pengaruh Politik Keluarga Atut Di Provinsi Banten.” Journal Of Goverment (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah) 10, no. 2 (2025): 1–18. <https://journal.uta-45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/view/8427>.

Setyawibawa, Ruru Aris. Rivalitas Politik Dinasti. Umsu Press, 2025.

Sihombing, T. S, D Manalu, and A. L Tobing. “Dinamika Preferensi Pemilih Milenial Pada Pemilihan Kepala Desa Dolok Margu Kecamatan Lintong

Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021.” Innovative: Journal Of Social Science Research 4, no. 2 (2024): 4828–43. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.9945>.

Situmorang, P. R, and H Yusuf. “Struktur Sosial Dan Budaya Korupsi: Analisis Kriminologis Terhadap Praktik Korupsi Di Lembaga Pemerintahan.” Jurnal Intelek Insan Cendikia 2, no. 8 (2025): 14057–66. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/4507>.

Suhendarto, B. P. “Masa Depan Pengaturan Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.” Jurnal Gagasan Hukum 6, no. 1 (2024): 62–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/jgh.v6i01.19883>.

Winters, J. A. Oligarchy. Cambridge University Press., 2011.